

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA MENGENAI PENYELENGGARAAN PRAKTIK
KERJA PROFESI PSIKOLOGI (PKPP)**

Oleh:

Haedar Ghaffar Ulfafaza¹, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terhadap mahasiswa peserta Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP) dalam hal tidak dilakukannya pembimbingan oleh psikolog pembimbing dan tanggung jawab psikolog pembimbing dalam hal terjadinya kerugian akibat tindakan yang dilakukan mahasiswa peserta PKPP terhadap klien.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif empiris yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer dan data sekunder. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan yaitu: pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tidak bertanggung jawab terhadap UII dan mahasiswa dalam hal tidak dibimbingnya mahasiswa peserta PKPP oleh psikolog pembimbing. Kedua, pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi efek samping yang merugikan terhadap klien selama proses psikologi dicantumkan dalam *informed consent*.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Perbuatan Melawan Hukum, *Informed Consent*, Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP)

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**LEGAL ANALYSIS OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF SLEMAN REGENCY AND UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA REGARDING THE IMPLEMENTATION OF PRAKTIK
KERJA PROFESI PSIKOLOGI (PKPP)**

By:
Haedar Ghaffar Ulfafaza³, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan⁴

ABSTRACT

This research aims to analyze the liability of the Public Health Office of Sleman towards students in case of supervision is not performed by the supervisor psychologist and the liability of a supervisor psychologist for the losses suffered by client caused by treatment given by student.

This research is a normative empirical research that combines library research and field research to gather both primary and secondary data. These data will be analyzed using qualitative descriptive method.

The results of this research showed that: First, the Public Health Office of Sleman is not responsible for Universitas Islam Indonesia and the student regarding the supervision that is not performed by the supervisor psychologist during PKPP. Secondly, the party responsible regarding the adverse effects suffered by client that occur throughout a psychological process is specified in the informed consent.

Keywords: Cooperation Agreement, Civil Wrongdoing, Informed Consent, Pratik Kerja Profesi Psikologi (PKPP)

³ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.